



Strategi Diplomasi Qatar dalam Kesepakatan Pertukaran Tawanan antara Hamas-Israel pada November 2023

Aulia Ul Khair

Magister Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

aulia22024@mail.unpad.ac.id

Windy Dermawan

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

windy.dermawan@unpad.ac.id

Dina Yulianti

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; email:

dina14@unpad.ac.id

| Submit: 27-07-2024 | Accept: 05-08-2024 | Publish: 13-08-2024 |

Keywords

niche diplomacy, ceasefire, Hamas, Qatar, Israel, hostage exchange

ABSTRACT

The war between Israel and Gaza resistance militias, led by Hamas, since October 2023 has involved the presence of prisoners, both from the Israeli and Palestinian sides. This article discusses Qatar's diplomatic strategy in the prisoner exchange agreement as part of the four-day ceasefire agreement between Hamas and Israel in November 2023. The achievement of the ceasefire agreement, including the exchange of hostages, is the result of Qatar's foreign policy, which positions it as a neutral middle power. To establish this ceasefire, Qatar has used niche diplomacy as an instrument of its foreign policy. This research was conducted using a qualitative method and found that Qatar has carried out niche diplomacy with several strategies, namely conciliating builder, bridging builder and integrating builder.

Kata Kunci

diplomasi niche, gencatan senjata, Hamas, Qatar, Israel, pertukaran sandera

ABSTRAK

Perang antara Israel dan milisi-milisi perlawanan Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, sejak Oktober 2023 telah melibatkan keberadaan tawanan, baik dari pihak Israel maupun Palestina. Artikel ini membahas strategi diplomasi Qatar dalam kesepakatan pertukaran tawanan sebagai salah satu bagian dari persetujuan gencatan senjata empat hari yang dijalin antara Hamas dan Israel pada November 2023. Tercapainya kesepakatan gencatan senjata, termasuk di dalamnya pertukaran sandera, merupakan hasil dari kebijakan luar negeri Qatar yang memosisikan diri sebagai *middle power* yang netral. Dalam upaya menjalin gencatan senjata ini, Qatar telah

menggunakan *niche diplomacy* sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menemukan bahwa dalam kasus ini Qatar telah melakukan *niche diplomacy* dengan sejumlah strategi, yaitu *conciliating builder*, *bridging builder* dan *integrating builder*.

PENDAHULUAN

Qatar adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut dengan populasi mayoritas muslim yang berada di semenanjung Arab di Teluk Persia. Qatar berbagi perbatasan teritorial dengan tiga negara monarki Teluk lainnya, yaitu Arab Saudi Arabia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, serta negara Republik Islam Iran. Selama dua dekade, Qatar telah menanamkan pengaruh di regional Arab dan Timur Tengah. Pada aspek pertahanan dan keamanan nasional, Qatar membina aliansi militer bersama Amerika Serikat (AS). Qatar juga membangun hubungan baik lintas aktor yang sering berselisih satu sama lain, seperti kelompok Islam Sunni Ikhwanul Muslimin (IM), kelompok Hamas di Gaza, Taliban di Afghanistan, maupun Iran yang menganut mazhab Syiah, Turki, bahkan Israel (Katzman, 2021:2; Policy, 2024).

Sejumlah peneliti mengategorisasikan Qatar sebagai *small power* Arab yang menerapkan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri (KLN) yang aktif, independen, netral, dan non-blok (Fromm, 2019:11; Yaari, 2021:148). Namun, Kawakibi (2022) menulis bahwa telah terjadi transformasi di mana Qatar bisa masuk sebagai kategori *middle power* di Timur Tengah, karena negara ini memiliki sumber daya keuangan yang melimpah dan seiring dengan itu, muncul elit politik baru dengan rencana strategis yang membawa transformasi Qatar menjadi kekuatan menengah regional yang melakukan kebijakan luar negeri yang lebih independen dan peran regional yang lebih aktif. Menurut konstitusi Qatar tahun 2005, prinsip kebijakan luar negeri Qatar adalah memperkuat perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mendorong penyelesaian sengketa internasional secara damai. Dengan kata lain, Qatar mengupayakan mediasi konflik (gco.gov.qa, 2016). Mediasi ini dianggap sebagai doktrin kebijakan luar negeri Qatar (Azem, 2024:3). Sebelum tahun 2011, Qatar telah merancang keunggulan komparatif yaitu memosisikan Qatar sebagai mediator konflik intra-regional Timur Tengah (Mills & Al-Mughrabi, 2023). Melalui modal politik, keuangan dan prinsip-prinsip KLN yang aktif, independen, netral dan non blok, Qatar telah menjadi mediator konflik inter-regional Arab dan Timur Tengah.

Selama era Musim Semi Arab dan pascakrisis Teluk 2017, aktivitas dan peran mediasi Qatar mengalami penurunan di regional Arab dan Timur Tengah (Milton et al., 2023:1). Pasca penyelesaian Krisis Teluk 2021 (di mana Qatar berseteru dengan Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk lain), peranan mediasi konflik Qatar sebagai pihak ketiga mendapatkan atensi kembali, antara lain dengan menjadi mediator dalam perjanjian AS dengan kelompok Taliban Afghanistan (Milton et al., 2023:1).

Aktivitas dan peranan Qatar melalui mediasi konflik pihak ketiga ditunjukkan kembali dalam masa serangan Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Peristiwa ini bermula dari serangan kelompok-kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, yang dipimpin Hamas, pada tanggal 7 Oktober 2023 ke sejumlah wilayah Israel setelah sebelumnya Israel melakukan penyerbuan dan kekerasan ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan 1445 H (English.aawsat, 2024). Peristiwa ini membawa implikasi luas bagi situasi sosial Israel dan Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu (Qatar dan Israel) (Walt & Mearsheimer, 2006:62; Yaari, 2020:15; Zanotti, 2024:2).

Perang antara kelompok-kelompok perjuangan Palestina di Gaza (yang dipimpin Hamas) dengan Israel, masih berlangsung hingga artikel ini ditulis (Juli 2023), hampir 300 hari. Namun artikel ini akan berfokus pada dinamika perang hingga bulan November 2023, di mana pada masa itu terjadi negosiasi antara Hamas (sebagai wakil dari seluruh faksi perjuangan kemerdekaan Palestina di Gaza) dan Israel yang dimediasi Qatar, yang membawa hasil adanya kesepakatan pertukaran sandera. Qatar melakukan

kolaborasi dengan dua mediator lainnya, yaitu AS dan Mesir (England, 2024). Ketiga mediator tersebut mendorong Hamas dan Israel untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil kedua negara, termasuk pertukaran tawanan, mendorong gencatan senjata, dan dibukanya jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza (Zanotti & Sharp, 2024:2).

Keterlibatan Qatar sebagai mediator pihak ketiga bersama AS dan Mesir mempertimbangkan adanya hubungan yang cukup dekat antara Qatar dengan Hamas dan diterimanya Qatar oleh Israel. Hubungan Qatar-Hamas dan Qatar-Israel sudah terjalin jauh sebelumnya, antara lain tercatat dalam dukungan perdamaian Arab-Israel berdasarkan Prakarsa Perdamaian Arab 2002. Prakarsa ini didukung juga oleh Liga Arab dan komunitas internasional (Aljazeera, 2020; Hirtsani, 2014)

Setelah melalui upaya-upaya mediasi, akhirnya pada tanggal 24 November 2023, komitmen perdamaian temporal berupa gencatan senjata keduanya dilaksanakan selama empat hari yang selanjutnya diperpanjang menjadi sepekan; di dalam kesepakatan ini juga ditetapkan pertukaran 80 tawanan Israel dengan 240 tawanan Palestina (Mills & Al-Mughrabi, 2023).

Keunikan Qatar sebagai mediator di Timur Tengah, dibandingkan aktor lainnya, seperti Arab Saudi dan Mesir, adalah citranya yang independen dan non-blok, tanpa membawa preferensi khusus maupun ideologi tertentu bagi aktor-aktor yang berkonflik (Kamrava, 2011:2). Qatar memiliki kapabilitas untuk menjalin hubungan dengan lintas aktor (*cordial ties*) (Yaari, 2020:21, 2021:28). Di samping itu, ada faktor dukungan AS terhadap Qatar dalam proteksi keamanan nasional Qatar (Simon & Stevenson, 2023). Sebelum negosiasi November 2023, Qatar juga terlibat dalam perundingan persatuan nasional Palestina dengan mengundang dua partai terbesar di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas ke perundingan di Doha secara berturut-turut pada tahun 2012, 2014 dan 2016 (Levitt, 2023; Qarjouli, 2023; Roberts, 2019).

Terkait peranan Qatar sebagai mediator di Timur Tengah, ditemukan sejumlah penelitian yang dilakukan sebelumnya. Restrukturisasi kebijakan luar negeri monarki Arab Teluk akibat *Arab Springs* telah menempatkan Qatar sebagai mediator aktif dan independent di Timur Tengah (Álvarez-Ossorio & Garcia, 2021:1). Peneliti lain menyimpulkan bahwa posisi ini didapat Qatar sebagai hasil dari penggunaan *soft power* dan menjunjung tinggi prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional (Alqashouti, 2021:2). Penelitian lain membahas tentang peningkatan keterlibatan peranan *small states*, dalam hal ini Qatar, dalam penggunaan *subtle power* pada proses internasional dan definisi ulang peranan dalam sistem internasional serta didasari strategi pertahanan diri dan aliansi (Al-Malki et al., 2023; Kamrava, 2017; Mohammadzadeh, 2017; Fromm, 2019).

Riset terkait yaitu penyanderaan telah dilakukan para peneliti, antara lain, penggunaan instrumen kebijakan luar negeri diplomasi, yang meliputi tugas negosiasi dan mediasi, terbukti efektif sebagai solusi krisis penyanderaan pada konflik skala kecil yang bergantung pada komitmen dan reliabilitas aktor (Istikharoh, 2017; Vetra Raisha et al., 2024; Wangke, 2016). Selanjutnya, (Almadani, 2018; Fraihat, 2020) meneliti krisis blokade Qatar di tahun 2017 oleh negara-negara Arab Teluk lainnya yang menguji pertahanan dan memberikan keuntungan signifikan tetapi berdampak negatif terhadap isu Palestina. (Eddin & Rahma, 2021:1,2) meneliti keterlibatan Qatar dalam isu Palestina adalah disebabkan oleh upaya melindungi keamanan dan kedaulatan, memegang solidaritas Arab dan Islam, serta mengambil peran selaku mediator konflik Palestina-Israel di regional Timur Tengah .

Dalam riset-riset terdahulu di atas, secara garis besar ditemukan bahwa aktivitas Qatar sebagai mediator konflik adalah bagian dari kebijakan luar negerinya, yang melibatkan salah satu instrumen penting KLN, yaitu diplomasi. Sejauh ini, belum ada kajian yang difokuskan terhadap strategi diplomasi Qatar dalam pembebasan tawanan pada kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel bulan November 2023. Artikel ini akan membahas strategi diplomasi tersebut dengan menggunakan konsep *niche diplomacy*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Niche Diplomacy

Cooper (1998) menggagas domain “*niche*” dari dinamika tatanan global era pasca-Perang Dingin yang mana fungsi kepemimpinan hirarki tradisional kaku di era bipolar menjadi tidak lagi relevan dan menyoroti terbukanya peluang bagi aktor-aktor negara lain dalam mengisi kepemimpinan pada konteks bentuk dan ruang lingkup aktivitas diplomasi *niche* (Cooper, 1997:4). Secara kebahasaan, *niche* bermakna “posisi atau minat yang memungkinkan seseorang atau sesuatu berkembang dalam lingkungan tertentu” (dictionary.com). Pada operasionalisasi domain diplomasi yang lebih mendalam, “*niche*” menawarkan sebuah instrumen untuk menganalisis perilaku negara *middle power* secara lebih sistematis. Penekanan diberikan untuk menelaah secara kategoris perilaku negara *middle power* dalam hal area, sektor atau isu spesifik yang menjadi target aktivitas. Kontras dengan negara *great power*, negara *middle power* tidak memiliki kapabilitas untuk beroperasi dengan cara yang berpengaruh pada seluruh spektrum kebijakan di samping ada pertimbangan berupa unsur-unsur seleksi yang terlibat dimana kelompok negara harus memprioritaskan isu spesifik di antara berbagai fungsi. Maka dari itu, suatu konstruksi keunggulan komparatif negara kegiatan harus dimunculkan (Cooper, 1997:6)

Setidaknya ada tiga strategi *niche diplomacy*, yang meliputi peran mendamaikan, menghubungkan, dan mengintegrasikan (*to conciliate, to interconnect and to integrate*) Seterusnya tiga strategi ini dikonsepkan menjadi *conciliate building/ good officer, interconnect building/ bridge building* dan *integrate building/ planetary management/ catalyst* yang akan mendeskripsikan peran-peran diplomasi *niche* Qatar (Cooper, 1997:55-61).

Pertama, negara akan bertindak sebagai *conciliating builder/good officer* atau pembangun konsiliasi. Peran ini ditujukan secara inklusif sebagai berbagai macam penyelesaian sengketa dan resolusi konflik oleh pihak ketiga, diluar arbitrase formal; atau metode adjudikasi lainnya. Pada dasarnya, *good office diplomacy* berperan bukan hanya sekedar *post office* bagi pihak-pihak yang bersengketa tetapi bisa juga bertindak sebagai narahubung yang jujur atau *honest broker*. Kadangkala, mediator dapat memberikan saran-saran substantif untuk membangun saling pengertian dan pertukaran pengetahuan dalam konteks persiapan dalam penyelesaian tawar menawar yang dirundingkan.

Kedua, negara mengambil peran sebagai *bridging builder/ interconnecting* dalam upaya-upaya terciptanya tahapan kolektif dalam menjalankan solusi demi mewujudkan pencapaian bersama. Fungsi ini menjadi ruang dan ajang negara *middle power* dalam memanfaatkan statusnya sebagai penyeimbang kekuatan untuk melangsungkan negosiasi bersama negara *great power* sampai dengan terwujudnya hubungan internasional yang dinamis.

Ketiga, negara berperan sebagai *integrating builder/ planetary management/ catalyst* atau pembangunan terpadu (katalisator). Fungsi ini lebih bersifat sistemik yang ditujukan untuk mengintegrasikan negara ke sistem internasional. Ketergabungan dalam lembaga dan jabatan formal pada organisasi internasional menyediakan peluang yang tidak terbatas. Kombinasi tiga fungsi ini dibutuhkan oleh negara mediator pihak ketiga agar bisa diandalkan pihak yang bersengketa.

METODE RISET

Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menganalisis data-data berupa dokumen tertulis, maupun dokumen audio-visual dengan tujuan untuk mendokumentasikan pengalaman di lapangan dan merefleksikannya ke kondisi eksistensial (Creswell, 2013; Saldana, 2011:5,8). Secara khusus, pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah studi kasus yang merupakan metode dengan fokus pada suatu unit analisis dalam suatu periode tertentu (Saldana, 2011:9). Dalam hal ini, fokus riset adalah strategi diplomasi dalam mencapai kesepakatan pembebasan tawanan pada gencatan senjata Hamas-

Israel November 2023. Kemudian, analisis data dilakukan melalui tiga alur yaitu *data condensation*, *data display and conclusion drawing* (Matthew et al., 2014:31,33).

PEMBAHASAN

Pilar-Pilar Kebijakan Luar Negeri Qatar 2003-2024

Dari sisi struktur sosial, secara umum Qatar memiliki karakteristik identik dengan Palestina, keduanya menempati geografis regional Arab, Timur Tengah, dominan Islam, namun Qatar teritorialnya dekat dengan Teluk Persia. Secara politis Qatar merupakan monarki Arab absolut yang dipimpin oleh seorang *Amir* (Raja) dan menempati teritorial sejumlah 11.572 km persegi dengan bilangan penduduk 2.668.811 jiwa. Secara ekonomi, Qatar digolongkan ke dalam jajaran negara kaya dunia menurut pendapatan nasional buah dari aktivitas ekspor minyak dan gas.

Praktik kebijakan luar negeri Qatar sedikit unik dibandingkan dengan negara regional Arab dan Timur Tengah lainnya yang cenderung menerapkan kristalisasi nilai-nilai independen dan non-blok (Yaari, 2020). Namun demikian, dalam aspek keamanan Qatar memilih beraliansi dengan AS. Hal ini terlihat sejak peristiwa Perang Teluk 1991 di mana Irak melakukan invasi militer terhadap Kuwait. Qatar mengambil kebijakan aliansi militer dengan AS demi keamanan nasionalnya, sebagai respon terhadap kandasnya ide sistem pertahanan kolektif Arab (Saidy, 2018).

Pasca empat dekade kemerdekaan, Qatar melakukan transformasi politik menjadi lebih demokratis dengan menetapkan konstitusi nasional pada tahun 2005 (Shafik, 2023). Kebijakan luar negeri yang independen, netral dan fleksibel berdasarkan dialog, diplomasi preventif, mediasi, *good office*, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta menjunjung tinggi prinsip non-intervensi negara lain dimuat di konstitusinya pada pasal 7 (Fromm, 2019:20,13)

Prinsip kebijakan luar negeri ini mengadopsi kombinasi antara upaya diplomatik, piagam universal PBB yang mempromosikan perdamaian, keamanan internasional, dan azas-azas hukum internasional. Prinsip itu dikombinasikan dengan elemen-elemen yang mencakup koneksi politik kuat dan sumber daya keuangan cukup sehingga membuat Qatar memiliki reliabilitas dan kenetralan serta mengkonkretkan Qatar selaku mediator yang dapat diandalkan di regional Timur Tengah (Alqashouti, 2021:84). Selain memainkan peran aktif promosi mediasi, Qatar juga melakukan koordinasi dan kerja sama bersama Dewan Keamanan (DK) PBB dan *the Group Friend of Mediation* (Harkness, 2020; Al-Hashami&Ahmad, 2023).

Kebijakan Luar Negeri Qatar sebagai *Middle Power*

Berdasarkan rekam jejak politik luar negerinya, perilaku Qatar merefleksikan perilaku negara yang melebihi klasifikasi negara *small power* di regional Arab dan Timur Tengah. Selain pendapat Kawakibi (2022) mengenai Qatar sebagai *middle power* di Timur Tengah, bila kita merujuk pada karakteristik negara *middle power* yang dikemukakan Jordaan (2003), Qatar telah menunjukkan perilaku kebijakan luar negeri yang menstabilkan dan melegitimasi tatanan global dengan mendorong aktivitas bersifat multilateral dan kooperatif.

Selain itu, perilaku *middle power* non-tradisional cenderung mengadaptasi transformasi global reformis non-radikal, menampilkan orientasi regional yang kuat, mendukung integrasi regional, dengan diiringi mengkonstruksi identitas berbeda dengan negara-negara lain, dalam hal ini antara Qatar dengan negara-negara Arab Teluk lainnya (Efsthathopoulos, 2023:1,2).

Politik luar negeri Qatar pada pasca transisi kepemimpinan Emir Hamad bin Khalifa Al Thani (1995-2013) kepada Emir muda Emir Tamim bin Hamad Al Thani (2013-sekarang) menunjukkan konsistensi keberlanjutan menggunakan pendekatan yang memprioritaskan keamanan nasional,

memproyeksikan *soft-power*, dan meneruskan intervensi ekstensif urusan-urusan regional Arab Timur Tengah termasuk isu Palestina (Hammond, 2014).

Sebelum perang 7 Oktober, Emir Tamim (2013-sekarang), baik secara personal maupun perwakilan resmi dalam konteks Palestina, adalah aktor di Teluk yang paling vokal menyerukan solusi perdamaian melalui *two state solution* dengan perbatasan tahun 1967 dan keadilan bagi bangsa Palestina (Elmali, 2024:23). Kepedulian Tamim dalam isu Palestina tercermin pada narasi penyampaian saat pelantikannya sebagai pemimpin Qatar di tahun 2013 dengan berkomitmen pada solusi dua negara dan diprakarsai perdamaian Arab 2002 (gco.gov.qa, 2024).

Nilai-nilai aktif dan independen yang ditindaklanjuti melalui intensitas keterlibatan kegiatan mediasi dan negosiasi dalam regional Timur Tengah merepresentasikan karakteristik Qatar sebagai *middle power*, alih-alih hanya *small power* yang perannya sebatas mendamaikan, menghubungkan, dan mengintegrasikan (*to conciliate, to interconnect and to integrate*). Pada kasus pembebasan tawanan ini, Qatar melakukan tiga strategi pembebasan yaitu pembangunan konsiliasi (*conciliation builder*), pembangun jembatan (*bridge builder*) dan pengatur tata kelola (*planetary manager*).

Pada *conciliation building*, Qatar menggagas konsiliasi yang melibatkan kedua pihak bertikai secara langsung, yaitu elit Hamas dan elit Israel. Pembangunan konsiliasi ini dilakukan melalui upaya mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian konflik tersebut dengan mengundang mereka untuk mediasi perundingan ke Doha, ibukota Qatar. Langkah yang dilakukan Qatar pada November 2023 tersebut berhasil melahirkan kesepakatan pertukaran tawanan, dengan jumlah 105 orang Israel (termasuk warga negara asing) dan 240 orang Palestina (timesofisrael.com, 2024). Keberhasilan implementasi awal ini pada akhirnya akan membantu strategi selanjutnya yaitu upaya pembangunan jembatan (*bridge builder*).

Pada strategi kedua ini, Qatar mengemban wewenang menjadi jembatan, narahubung, atau mediator kepentingan antara lintas aktor baik negara berpengaruh di regional. Maka dari itu, keterlibatan dalam proses ini dapat mendongkrak citra Qatar sebagai *good international citizenship* dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Pada rincian domain *integrating builder/catalyst/ planetary manager*, Qatar mengemban tugas mengoperasionalkan prinsip-prinsip perdamaian internasional di tingkat regional dengan tujuan agar prospek pembangunan integrasi yang dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya dengan aturan universal yang berlaku. Berikut ini rincian analisis mengenai strategi *niche diplomacy* Qatar dalam kasus pembebasan sandera November 2023.

1. Qatar sebagai *Conciliate Building*

Strategi konsiliasi ini merupakan suatu upaya kesepakatan bersama dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa. Pembentukan konsiliasi yang dimaksud berlandaskan adanya keselarasan prinsip dan ide oleh para pihak yang bersengketa. Peran yang digunakan negara mediator dalam pembentukan konsiliasi adalah menjalin kepercayaan dengan segala aktor. Dengan begitu, perwujudan kepentingan negara mediator pihak ketiga dapat tercapai melalui upaya kolektif. Sesuai kapabilitasnya sebagai negara *middle power*, Qatar membentuk beberapa konsiliasi sebagai negosiator dan fasilitator petinggi-petinggi Hamas dan Israel ke Doha dan berkomitmen sebagai *honest broker* yang aktif dan independen terhadap keduanya (Thani, 2023).

Qatar memfokuskan solusi dalam krisis Hamas-Israel ini dan mencegah penyebaran konflik ini ke wilayah lainnya dengan menyepakati gencatan senjata, memberikan kemudahan akses bantuan kemanusiaan, dan membebaskan tawanan yang berasal dari Israel, serta pembebasan orang-orang Palestina yang ditahan oleh Israel (Azem, 2024:7). Pada 24 November 2023, mulai dilakukan pertukaran tawanan, di mana total sandera dari Israel yang dibebaskan adalah 105 orang (termasuk warga negara asing) dan orang Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel adalah 240 orang

(timesofisrael.com, 2024). Dalam hal ini, konsiliasi yang ditunjukkan Qatar memiliki keselarasan tujuan dengan mitra kolaborasinya AS dan pihak yang bersengketa Hamas dan Israel. Pembangunan konsiliasi informal mediasi juga dilakukan Qatar melalui dukungan pemberian akomodasi dan finansial kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mempercayai Qatar sebagai *honest-broker* (Barakat, 2021:14). Qatar juga melakukan hal yang sama kepada Hamas-Israel 2023 saat perundingan konsiliasi damai digelar.

2. Qatar sebagai Bridge Builder

Bridge builder atau narahubung kepentingan oleh negara mediator diimplementasikan dalam dua bentuk peran. Pertama, negara mediator menjadi *normative balancing* artinya mengimbangi keberadaan *great power*. Penyeimbangan kekuatan tidak memiliki tendensi konfrontatif tetapi lebih kepada penyesuaian kepentingan di tengah perbedaan, sehingga muncul hubungan yang lebih dinamis.

Kedua, negara mediator pihak ketiga akan menjadi fasilitator bagi *great power*. Negara mediator mengakomodasi kepentingan yang ada untuk mendistribusikan kekuatannya untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Strategi ini menjadi salah satu upaya negara mediator untuk menjadi *good international citizenship*.

Qatar menunjukkan kapabilitasnya sebagai narahubung kepentingan antara AS, Israel, dan Palestina dalam memediasi konflik Hamas-Israel guna mewujudkan konsiliasi lebih lanjut. Perdana Menteri (PM) dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menekankan bahwa Qatar berkomitmen menjadi mediator yang jujur dalam isu Palestina, regional, maupun internasional (Aljazeera, 2024).

Beberapa jam setelah operasi serangan 7 Oktober 2024 yang dilakukan Hamas, Qatar dengan dukungan AS dan Israel memulai mediasi pembebasan tawanan dengan Hamas. Qatar memprioritaskan pembebasan tawanan-tawanan wanita sipil Israel dan warga negara AS (Azem, 2024:7).

3. Qatar sebagai Planetary Manager

Qatar sebagai *Planetary Manager* atau pengelolaan ruang mencakup pengelolaan pengaruh dalam proses berskala dunia (Newton, 1999:1,2). Strategi ini juga bisa disebut sebagai *integrator builder* (katalisator). *Planetary Management* direalisasikan oleh negara *middle power* dengan melakukan "*positive inducement*" dalam upaya penyelesaian masalah internasional. Upaya ini diterapkan dengan cara melakukan upaya persuasif kepada negara lainnya agar menaati norma internasional yang memiliki keterhubungan dengan inti permasalahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh negara-negara *middle power* dengan tujuan untuk mempertahankan legitimasinya sebagai mediator. Sebagai upaya perwujudan pembangunan konsiliasi berkelanjutan, Qatar menegakkan norma non-blok dan *neutrality* sebagaimana yang termuat dalam konstitusinya.

Aksi penahanan orang Israel oleh Hamas bukan sebuah kasus baru yang dimediasi oleh pihak ketiga. Kekalahan yang diterima Israel lewat penyanderaan seorang perwira-nya Israel oleh Hamas rentang tahun 2006-2011 berakhir dengan pertukaran 1027 tawanan Palestina melalui mediasi Mesir (Schweitzer, 2022:24; timesofisrael.com, 2023). Kekalahan yang diderita Israel melalui perang menghadirkan negosiasi alot serta berbagai pendekatan yang digunakan terhadap Hamas untuk melakukan pertukaran tawanan serta bermediasi dengan mereka. Tawar-menawar ini menjadikan posisi Hamas sebagai aktor non-negara yang diperhitungkan di Timur Tengah (Schweitzer, 2022:25). Pada konteks riset ini, kasus penyanderaan orang-orang asal Israel (termasuk warga asing) oleh Hamas pada perang 2023 hampir mempunyai kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya, namun berbeda dalam hal pihak mediatornya, sehingga memunculkan analisis yang berbeda.

Dinamika Hubungan Qatar, Hamas, dan Israel

Upaya-upaya memediasi konflik Palestina-Israel telah dilakukan oleh beberapa negara Arab selain Qatar, baik yang terikat diplomatik atau tidak, seperti Mesir dan Arab Saudi. Mesir dan Arab Saudi sebagai mediator regional tradisional Arab sering kali menemukan hambatan dalam penanganan titik-titik persetujuan di regional Arab, seperti yang terjadi pada konflik Yaman, konflik Darfur di Sudan dan konflik Palestina-Israel di Jalur Gaza. Hambatan ini tidak dijumpai oleh Qatar sebagai mediator konflik kontemporer Arab yang leluasa memediasi tiga konflik di atas dengan intens pada tahun 2006-2010 (Kamrava, 2013). Potensi dan tantangan prospektif Qatar sebagai mediator sangat signifikan selama musim panas 2009 ketika berlangsungnya serangan militer *Cast Lead Operation* oleh Israel terhadap teritorial Palestina di Jalur Gaza. Sejak tahun 2012, kedekatan pemerintah Qatar dengan Hamas yang merupakan partai politik Palestina pemenang pemilu 2005, terjalin baik, bahkan ibu kota Qatar, Doha, menjadi rumah bagi kepemimpinan Politik Hamas.

Hubungan ketiga aktor (Qatar, Hamas, Israel) saling terhubung secara tidak langsung. Intensitas kedekatan hubungan Qatar-Hamas menguat ketika Liga Arab tidak mampu melaksanakan mediasi konflik domestik regional mereka. Ketidakberdayaan ini mengundang Qatar, Arab Saudi, dan Mesir mengisi peran tersebut (Alqashouti, 2021:3; Felsch, 2020:6). Namun, hanya Qatar satu-satunya yang mempunyai kapabilitas jejaring komunikasi lintas aktor (*cordial ties*). Qatar memediasi konflik Hamas-Israel untuk pertama kalinya pada kasus serangan Israel 2009 ke Jalur Gaza. Dukungan politis kembali ditampilkan Qatar melalui pembukaan kantor Biro Politik Hamas di Doha, Qatar pada tahun 2012. Dukungan kemanusiaan dan finansial kepada Hamas secara khusus dan Otoritas Palestina di Ramallah setiap tahun juga diberikan sejak tahun 2012 (Alavi, 2021; Mughrabi, 2021; Padash et al., 2019).

Dalam level diplomatik resmi, hubungan bilateral Qatar-Israel terbelah stagnan (Keay, 2023; Najdi & Restle, 2023; Yossef, 2021). Pasca Kesepakatan Oslo I dan II, Qatar menjadi negara Arab pertama yang membuka kantor dagang dengan Israel tahun 1995, hubungan keduanya membeku setelah Intifadah sejak tahun 2002 hingga saat ini (Haaretz, 2021; Ravid, 2020). Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, Qatar memiliki peran sebagai mediator, melebihi negara-negara Arab yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel (seperti UAE dan Bahrain) (Stivachts, 2018). Bahkan, ketika perang Hamas-Israel terjadi sejak 2023, hubungan komunikasi antara intelijen AS (CIA), intelijen Israel (Mossad), dan Politbiro Hamas, terjalin secara ekstensif di Doha (Al Arabiya, 2023; Lis, 2024; Reuters, 2023). Ini menunjukkan kemampuan Qatar dalam membangun *interconnecting building* di Timur Tengah.

Mediasi merupakan strategi yang memungkinkan dilakukan dalam pembebasan tawanan asal Israel di Jalur Gaza. Karena, semakin lama sandera ditawan Hamas semakin berbahaya apalagi ditengah eskalasi serangan Israel yang menyasar secara acak. Konsultasi Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani kepada Hamas yang memiliki Biro Politik di Doha dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pembebasan tawanan dari Hamas guna menimbang hubungan dan dukungan yang terjalin baik antara pemerintah Qatar dan Hamas.

KESIMPULAN

Perang yang terjadi antara Israel dan kelompok-kelompok perjuangan Palestina di Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga saat artikel ini ditulis. Artikel ini berfokus pada fenomena bulan November 2023, di mana kesepakatan gencatan senjata sementara antara Hamas (sebagai wakil dari seluruh faksi perjuangan kemerdekaan Palestina di Gaza) dan Israel telah tercapai, di mana salah satu poin penting kesepakatan ini adalah pertukaran tawanan. Kesepakatan ini dimediasi oleh Qatar dengan berkolaborasi dengan dua mediator lainnya, yaitu AS dan Mesir. Poin-poin lain dalam kesepakatan gencatan senjata itu adalah gencatan senjata sementara dan dibukanya jalur bantuan kemanusiaan dari perbatasan Rafah masuk ke Gaza.

Keterlibatan Qatar sebagai mediator merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Qatar yang dilandasi oleh prinsip-prinsip mewujudkan perdamaian dan keamanan regional Timur Tengah. Maka dari itu, Qatar menerapkan strategi *niche diplomacy*, yaitu pembangunan konsiliasi (*conciliation builder*), pembangun jembatan (*bridge builder*) dan pengatur tata kelola (*planetary manager*). Dalam pelaksanaan strategi ini, Qatar memprioritaskan penurunan eskalasi konflik, pembebasan tawanan, dan kemudahan bantuan kemanusiaan memasuki zona perang. Hasil penting dari strategi ini adalah pembebasan 105 tawanan Israel (termasuk warga negara asing) yang ditukar dengan 240 orang Palestina yang ditahan oleh Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arabiya. (2023). *Qatar's mediation success: Behind-the-scenes of brokering Israel-Hamas truce*. Al Arabiya English. <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/12/01/Qatar-s-mediation-success-Behind-the-scenes-of-brokering-Israel-Hamas-truce>
- Al-Malki, F. K., Safranchuk, I. A., & Chernov, D. N. (2023). Actorness Of Small Power : The Case of Qatar. *Journal of Globalization Studies*, 14(2), 1–10. <https://doi.org/10.30884/jogs/2023.02.07>.
- Alavi, S. A. (2021). *Iran ' s Relations with Palestine : Past , Present , Future* (1; Nomor June). <https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Iran-Relations-with-Palestine-Past-Present-Future.pdf>
- Aljazeera. (2020). *Qatar reiterates stance 'in supporting Palestinian people.'* Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/qatar-stance-supporting-palestinian-people>
- Aljazeera. (2024b). *Qatar committed to Israel-Hamas honest mediator role: Diplomatic sources*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/5/5/qatar-committed-to-israel-hamas-honest-mediator-role-diplomatic-sources>
- Almadani, A. (2018). *Qatar Crisis and Its Impact on the Palestinian Cause* (Vol. 138). <https://intpolicydigest.org/2017/06/16/israel-navigate-gulf-crisis/>.
- Alqashouti, M. (2021). Qatar Mediation: From Soft Diplomacy to Foreign Policy. In *Gulf Studies* (Vol. 4, hal. 73–92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1391-3_6
- Álvarez-Ossorio, I., & Garcia, L. R. (2021). The foreign policy of Qatar: From a mediating role to an active one. *Revista Espanola de Ciencia Politica*, 56, 97–120. <https://doi.org/10.21308/RECP.56.04>
- Azem, A. J. (2024). *Qatar and the Repercussions of the October 7 War: Between Managing the Conflict and Solving it* (Nomor 027). [https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/attachments/policypapers/Ahmad Jamil Azem 027.pdf](https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/attachments/policypapers/Ahmad%20Jamil%20Azem%20027.pdf)
- Barakat, S. (2021). *Qatar's mediation – motivations, acceptance and modalities*. crisisgroupsisgroup. <https://www.c-r.org/accord/still-time-talk/qatars-mediation---motivations-acceptance-and-modalities>
- CIA. (2021). *Qatar*. CIA. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2021/countries/qatar/>
- Cooper, A. F. (1997). *Niche Diplomacy Middle Powers After The Cold War* (G.R.Berridge (ed.); 1st ed.). Macmillan Press Ltd , St. Martin's Press, Inc.,.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, & M. Masson (ed.); 3rd edition). SAGE Publications Inc.
- Eddin, L. N., & Rahma, E. A. (2021). On Qatar's Pragmatic Foreign Policy: The Palestinian Case. In *Gulf Studies* (Vol. 4). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1391-3_7/COVER
- Efstathopoulos, C. (2023). Global IR and the middle power concept: exploring different paths to agency. *Australian Journal of International Affairs*, 77(2), 213–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2191925>
- Elmalı, B. (2024). *From Past to Present: The Israeli-Palestinian Conflict*. TRT WORLD RESEARCH CENTRE. https://researchcentre.trtworld.com/wp-content/uploads/2023/11/InfoPack_Israel_Palestinian_Conflict-v4.pdf
- England, A. (2024). *Qatar reconsiders mediator role between Hamas and Israel*. Financial Times. <https://www.ft.com/content/007b0cce-1778-4ba8-a3c0-0879e8492292>
- English.aawsat. (2024). *Elusive Hamas Leader Deif Masterminded Oct. 7 Attack on Israel*. english.aawsat. <https://english.aawsat.com/features/5046097-elusive-hamas-leader-deif>

- masterminded-oct-7-attack-israel
- Felsch, M. (2020). The Ascent of Saudi Arabia to a Regional Hegemon : The Role of Institutional Power in the League of Arab States. *International Studies*, 1(April), 1–13. <https://doi.org/10.1177/0020881720911834>
- Fraihat, I. (2020). Superpower and Small-State Mediation in the Qatar Gulf Crisis. *International Spectator*, 55(2), 79–91. <https://doi.org/10.1080/03932729.2020.1741268>
- Fromm, N. (2019). *Constructivist Niche Diplomacy Qatar's Middle East Diplomacy as an Illustration of Small State Norm Crafting* (M. Beck, C. Harders, A. Jünemann, R. Ouaisa, & S. Stetter (ed.)). Springer VS. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-22519-3>
- gco.gov.qa. (2016). *Qatar Constitution*. gco.gov.qa. <https://www.gco.gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-Constitution-English.pdf>
- gco.gov.qa. (2024). *His Highness Speech at the 72nd Session of the UN General Assembly*. GCO Government Qatar. <https://www.gco.gov.qa/en/speeches/his-highness-speech-at-the-72nd-session-of-the-un-general-assembly/>
- Haaretz. (2021, Januari 18). Editorial | Israeli Minister's Decision on B'Tselem Is an Insult to Education. <https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2021-01-18/ty-article-opinion/israeli-ministers-decision-on-btselem-is-an-insult-to-education/0000017f-defb-db5a-a57f-defbfa9e0000>
- Harkness, G. (2020). Changing Qatar: Culture, Citizenship, and Rapid Modernization. *Changing Qatar*. <https://doi.org/10.18574/NYU/9781479889075.001.0001>
- Hirtsani, M. M. Al. (2014). *Yutubitaa At Ta'aayush Ad Dawlatul Wahidati fi filasthini : Al Haalu wal Maalu*. Arab Scientific Publishers. <https://studies.aljazeera.net/en/ebooks/coexistence-utopia-one-state-palestine-case-and-fate>
- Istikharoh, A. (2017). Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Sandera di Luar Negeri Studi Kasus: Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf pada Maret-April 2016. *Journal of International Relations*, 3(3), 1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/16756/16092>
- Kamrava, M. (2011). Mediation and Qatari Foreign Policy. *Middle East Journal*, 65(4), 539–556. https://www.researchgate.net/publication/233600586_Mediation_and_Qatari_Foreign_policy
- Kamrava, M. (2017). Qatari Foreign Policy and the Exercise of Subtle Power. *International Studies Journal (ISJ) International Studies Journal*, 14(2), 91–123. https://www.isjq.ir/article_89904_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
- Katzman, K. (2021). *Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy*. CRS. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44533/66>
- Kawakibi, S. (2023). Qatar's Role in the Geopolitical Scenarios of the Middle East and North Africa. <https://www.iemed.org/publication/qatars-role-in-the-geopolitical-scenarios-of-the-middle-east-and-north-africa/>
- Keay, L. (2023). *Why is Qatar involved in negotiations between Israel and Hamas?* Sky News.
- Levitt, M. (2023). *The Hamas-Iran Relationship*. jstribune. <https://jstribune.com/levitt-the-hamas-iran-relationship/>
- Lis, J. (2024). *Qatar Denies Hamas Leaders Exile Clause as Israel Responds to New Hostage Release Proposal*. Haaretz. <https://www.haaretz.com/israel-news/2024-01-11/ty-article/premium/qatar-denies-hamas-leaders-clause-as-israel-responds-to-new-hostage-release-proposal/0000018c-f87b-d517-af9d-fc7f5e340000>
- Al-Hashami, M.S., Ahmad, N.S.Y. (2023). Political Assessment Of Qatari Crisis On The GCC Security. *Jurnal Wacana Politik*.
- Matthew, M., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (J. Saldana (ed.); 3rd ed.). SAGE Publications.
- Mills, A., & Al-Mughrabi, N. (2023). *Qatar in talks with Hamas, Israel to swap hostages for prisoners*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/qatar-leads-talks-swap-hamas-held-hostages-palestinians-israeli-jails-2023-10-09/>
- Milton, S., Elkahlout, G., & Tariq, S. (2023). Qatar's evolving role in conflict mediation. *Mediterranean Politics*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2266665>
- Mohammadzadeh, B. (2017). Status and Foreign Policy Change in Small States: Qatar's Emergence in Perspective. *International Spectator*, 52(2), 19–36.

- <https://doi.org/10.1080/03932729.2017.1298886>
- Mughrabi, N. Al. (2021). *Hamas official says Qatar enables fuel-to-cash scheme for Gaza civil servants*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-official-says-qatar-enables-fuel-to-cash-scheme-gaza-civil-servants-2021-11-22/>
- Newton, P. (1999). A manual for planetary management. *Nature*, 400(6743), 399–399. <https://doi.org/10.1038/22634>
- Padash, H., Ebrahimzadeh, M., & Khodapaneh, B. (2019). Identifying value-adding activities in Tehran compared to Seoul. *Ecofran-Mexico*, 10(No 22), 1–13. <https://www.semanticscholar.org/paper/benchmarking-a-sister-city%3A-Identifying-activities-Padash-Ebrahimzadeh/520070057c722ff4c52f15c9fd3a3914cb632ee8>
- Policy, M. E. (2024). *Qatar's Delicate Balance Between Hamas and the West*. Middle East Policy. <https://mepc.org/commentaries/qatars-delicate-balance-between-hamas-and-west/>
- Qarjouli, A. (2023). *Qatar in 'unique' position to bridge deep divide between Palestinian factions: analysts*. Doha News. <https://dohanews.co/qatar-in-unique-position-to-bridge-deep-divide-between-palestinian-factions-analysts/>
- Ravid, B. (2020, December 10). *Morocco to normalize ties with Israel in deal with Trump over Western Sahara*. Axios. <https://www.axios.com/2020/12/10/morocco-israel-deal-trump-recognize-western-sahara>
- Reuters. (2023). *The secret negotiations that led to the Gaza hostages deal*. Reuters. <https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/gaza-news/article-774656>
- Roberts, D. B. (2019). *Reflecting On Qatar's "Islamist" Soft Power*. The Brookings Institute. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/FP_20190703_qatar_roberts.pdf
- Saidy, B. (2018). Qatar's Defense Policy: Smart Choices of a Small State. Dalam *Qatar's Defense Policy: Smart Choice of a small state* (No. 24, June).
- Saldana, J. (2011). *Fundamentals of Qualitative research*. Oxford University Press. <https://zlibrary-asia.se/book/2323533/61c684/fundamentals-of-qualitative-research.html?dsources=recommend>
- Schweitzer, Y. (2022). *A Mixed Blessing: Hamas, Israel, and the Recent Prisoner Exchange*. INSS. <https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/12/fe-233001974.pdf>
- Shafik, F. F. (2023). *Qatar's Constitution*. Oxford University Press, Inc. This. https://www.constituteproject.org/constitution/Qatar_2003.pdf?lang=en
- Simon, S., & Stevenson, J. (2023). The Gaza Horror and US Policy. *Survival*, 65(6), 37–56. <https://doi.org/10.1080/00396338.2023.2285600>
- Times of Israel. (2023). *Qatari prime minister says his nation does not 'have a war with Israel.'* TimesofIsrael. <https://www.timesofisrael.com/qatari-prime-minister-says-his-nation-does-not-have-a-war-with-israel/>
- Times of Israel. (2024). *Qatari PM says Israel-Hamas talks on Gaza truce, hostage deal are 'stalling'* <https://www.timesofisrael.com/qatari-pm-says-israel-hamas-talks-on-gaza-truce-hostage-deal-are-stalling/>
- Stivachtis, Y. A. (2018). *Conflict and diplomacy in the Middle East: external actors and regional rivalries* (S. McGlichey, M. Karakoulaki, & A. P. Wilczewska (ed.)). E-International Relations Publishing.
- Thani, M. bin H. Al. (2023). *Qatar Is the Mideast's Honest Broker*. WSJ. <https://www.wsj.com/articles/qatar-is-the-mideasts-honest-broker-hamas-israel-america-middle-east-conflict-peace-19e3cc0f>
- Vetra Raisha, Maruti, A., Widya, B., & Junior Chavin Megawanto. (2024). Analisis Upaya Indonesia Dalam Menangani Pembebasan WNI Dari Kelompok Terorisme Abu Sayyaf. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2903>
- Walt, S., & Mearsheimer, J. J. (2006). *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*. https://web.archive.org/web/20140207191820id_/http://www.thesecrettruth.com/israelilobby.pdf
- Wangke, H. (2016). Keberhasilan diplomasi total. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, VIII(10), 1–4. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-10-II-P3DI-Mei-2016-4.pdf
- Yaari, M. (2020). Israel's Relations with Arab Countries: The Unfulfilled Potential. In K. R. . Gan-Kahana Merav ,Goren Nimrod (Ed.), *Israel and Qatar: Relations Nurtured by the Palestinian Issue*

- (hal. 1–14). mitvim. https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Dr._Michal_Yaari_-_Israel_and_Qatar_-_Relations_nurtured_by_the_Palestinian_issue_-_March_2020-1.pdf
- Yaari, M. (2021). *Israel's Relations with Arab Countries: The Unfulfilled Potential* (M. K. Dagan, G. Nimrod, & R. Kibrik (ed.)). mitvim. <https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Israels-Relations-with-Arab-Countries-The-Unfulfilled-Potential-January-2021.pdf>
- Yossef, A. (2021). *The Regional Impact of the Abraham Accords*. <https://mwi.westpoint.edu/wp-content/uploads/2021/02/regional-impact-abraham-accords.pdf>
- Zanotti, J. (2024). *Israel: Major Issues and U.S. Relations*. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44245>
- Zanotti, J., & Sharp, J. M. (2024). *Israel and Hamas Conflict In Brief: Overview, U.S. Policy, and Options for Congress*. <https://sgp.fas.org/crs/mideast/R47828.pdf>